

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis konsistensi antara dokumen perencanaan pemerintah daerah dengan dokumen perencanaan SKPD terlihat bahwa :
 - a. Hasil analisis menunjukkan konsistensi antara RPJMD dan Rentsra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2015 menunjukkan tingkat konsistensi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari semua program yang ada pada Resntra SKPD semua selaras dan dapat diakomodir pada RPJMD Kota Padang Panjang.
 - b. Analisis konsistensi antara Renstra dan Renja dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 55 kegiatan yang ada di Renja yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan Renstra SKPD sebesar 98,18% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik
 - c. Analisis konsistensi antara Renstra dan Renja dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 55 kegiatan yang ada di Renja yang penyusunannya konsisten atau berpedoman

dengan Renstra SKPD sebesar 98,18% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik.

d. Pada analisis konsistensi antara Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang dan RKPD tahun 2015 terlihat bahwa 52 kegiatan yang ada pada RKPD semua dapat diakomodir dalam Renja SKPD atau 100% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik.

e. Selanjutnya konsistensi antara RKPD dan DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang tahun 2015 terlihat bahwa kegiatan yang sesuai dan konsisten dengan RKPD adalah sebesar 94,23% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik.

2. Penyebab ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu :

a. Kurangnya komitmen dari pihak stakeholder untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

b. Kurangnya kualitas dari pejabat perencanaan dan penganggaran, hal ini tercermin dari penyusunan dokumen perencanaan yang terkesan copy paste dengan perencanaan sebelumnya dan perencanaan dari instansi lain.

c. Adanya dana khusus yang diterima dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di daerah yang sasaran dan tujuannya tumpang tindih dengan program dan kegiatan di daerah.

- d. Pimpinan daerah yang kurang dalam memperhatikan proses perencanaan dan penganggaran dan kebijakannya yang sering melakukan mutasi para pemegang kebijakan.
3. Dari analisis capaian kinerja
- a. Capaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan sangat baik.
- b. Dari 16 buah indikator yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dapat dianalisa hanya 11 indikator sisanya tidak dapat dianalisa karena ketidakterediaan data yang diperoleh, maka fokus penelitian ini hanya 11 indikator.

1.2 Saran

Terhadap beberapa persoalan yang ditemukan dari hasil penelitian untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang, maka dapat direkomendasikan :

1. Perlunya mengoptimalkan fungsi perencana pada SKPD terutama pada setiap bidang dan seksi.
2. Perlunya meningkatkan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

3. Peningkatan intensitas koordinasi dengan pejabat perencanaan di SKPD, Bappeda dan Tim Anggaran
4. Meningkatkan SDM perencana melalui pelatihan dan pendidikan mengenai penyusunan dan perencanaan anggaran.
5. Dalam penyusunan indikator kinerja sebaiknya mempedomani aturan yang telah ada dan sudah ditetapkan

